



► GEDUNG SEKOLAH

Kontraktor Proyek Di-blacklist

SLEMAN—Pekab Sleman memasukkan satu kontraktor ke dalam daftar hitam alias *blacklist* dan penalti atau denda. Kebijakan itu diambil karena rekanan tersebut tidak mampu merampungkan proyek sesuai kontrak pembangunan ruang kelas baru di SMPN 2 Mlati.

Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Sleman, Nur Fitri Handayani, mengatakan pembangunan gedung SMPN 2 Mlati berhenti lantaran rekanan tidak dapat menyelesaikannya. Ada persoalan finansial yang terjadi di tengah pekerjaan mereka. Kejadian ini merugikan Pekab Sleman, utamanya siswa.

Proyek pembangunan di 2024 tersebut rencananya baru dilanjutkan pada 2026. Namun, Pekab perlu menghitung kebutuhan anggaran terlebih dahulu. Karena itu Pekab memasukkan rekanan dalam daftar hitam. Rekanan juga dikenakan denda.

“Pengusul agar rekanan masuk *blacklist* dari Dinas Pendidikan karena mereka yang punya pekerjaan,” kata Fitri saat ditemui di kantornya, Jumat (10/5).

Fitri mengaku Disdik memiliki anggaran cadangan yang saat ini digunakan untuk memperbaiki gedung ruang belajar mengajar, bukan anggaran untuk melanjutkan pembangunan. Paket pengerjaan minimalis ini sekitar Rp200 juta.

Ia menegaskan rekanan mendapat pemutusan kontrak di tengah pengerjaan, sehingga anggaran untuk melanjutkan pembangunan tidak langsung muncul atau dianggarkan untuk tahun depannya.

Sebenarnya, pengajuan anggaran bisa dilakukan dalam APBD Perubahan, sekitar Agustus 2025. Namun, hal itu mempertimbangkan tahap pembangunan mulai dari lelang yang memakan waktu. Sedangkan, tahun anggaran hanya menyisakan lima bulan.

“Model APBD kan N-1 [satu tahun sebelumnya]. Pengerjaan pembangunan ruang kelas di SMPN 2 Mlati tahun 2024. Nah, pada 2024 Bappeda dan BKAD sudah membahas anggaran 2025 dengan situasi belum tahu rekanan ini akan diputus kontrak,” katanya.

Dua tahun lalu, ada rekanan masuk daftar hitam tapi tidak terkena pemutusan kontrak. Rekanan itu membangun gedung layanan di RSUD Prambanan. Kualitas pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi menjadi sebabnya.

Berbeda dengan rekanan pembangunan SMPN 2 Mlati, rekanan pembangunan gedung layanan RSUD Prambanan menyelesaikan pekerjaan hingga akhir.

Plt Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Sleman, Mustadi, mengatakan jajarannya telah meminta pihak sekolah untuk menyampaikan surat sanksi kepada rekanan. “Perintahnya dari Kepala Dinas ke Kepala Sekolah. Terkait dengan besaran penalti saya belum tahu persis, yang jelas kami juga telah menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan atas pembangunan gedung SMPN-2 Mlati,” kata Mustadi. (Andreas Yuda Pramono)